

Fungsi Kontrol Pers Media Harian Rakyat Sultra Terhadap Kebijakan Penanganan Bencana Banjir Pemerintah Kota Kendari

Umar Marhum¹, Rahmanuddin Tomalili², Hasjad³, Agus Ariadi⁴
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lakidende, Indonesia

umarmarhum@gmail.com¹

Abstrak

Kata Kunci:

Fungsi Kontrol Pers, Kebijakan, Banjir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pers Harian Rakyat Sultra dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap kebijakan Pemerintah Kota Kendari dibidang penanganan bencana banjir di Kota Kendari serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pers Harian Rakyat Sultra dalam menjalankan fungsi kontrolnya sebagai bentuk pressure kebijakan Pemerintah Kota Kendari terhadap masalah penanganan bencana banjir di Kota Kendari. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Mei 2023 di kantor Harian Rakyat Sultra, penelitian ini lebih komprehensif dan obyektif, karena data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif lalu dideskripsikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa, media Harian Rakyat Sultra dalam mengemban fungsi kontrol pers, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pers No : 40 Tahun 1999 tentang Pers dibidang lingkungan, khususnya dalam hal menyuarkan masalah penanganan banjir yang terus melanda masyarakat Kota Kendari, pada setiap musim hujan dengan intensitas tinggi, belum maksimal. Walaupun pada dibidang lain seperti Pendidikan, Bisnis dan Politik telah dilakukannya secara maksimal, karena adanya rubrikasi khusus yang disiapkan. Sementara rubrik lingkungan, khususnya penanganan masalah banjir di Kota Kendari hanya ditempatkan pada rubrik halaman Metro, yang merupakan gabungan dari semua berita peristiwa di Kota Kendari. Tidak adanya rubrik halaman khusus tentang lingkungan pada media Harian Rakyat Sultra, alasan adanya unsur fungsi bisnis media dalam sebuah penetapan rubrik menjadi faktor penyebab minimnya jumlah berita harian Rakyat Sultra dalam menyorot isu kebijakan pemerintah kota Kendari terhadap masalah banjir dan penanganannya.

Abstract

Key Word:

Press Control Function, Policy, Flood.

This study aims to determine how the function of the Sultra Daily press in carrying out its control function on the Kendari City Government's policies in the field of flood disaster management in Kendari City and to determine what efforts have been made by the Sultra Daily Press in carrying out its control function as a form of pressure on the Kendari City Government's policies on flood disaster management in Kendari City. This research was conducted from March to May 2023 at the Sultra Daily office, this research is more comprehensive and objective, because the data collected was analyzed qualitatively and then described. The results of the study show that the Sultra Daily media in carrying out the press control function, as stated in the Press Basic Law No. 40 of 1999 concerning the Press in the environmental sector, especially in terms of voicing the problem of flood management that continues to hit the Kendari City community, in every rainy season with high intensity, has not been maximized. Although in other fields such as Education, Business and Politics it has been carried out optimally, because there is a special rubric that has been prepared. Meanwhile, the environmental rubric, especially the handling of flooding problems in Kendari City, is only placed on the Metro page rubric, which is a combination of all news events in Kendari City. The absence of a special environmental rubric in the Rakyat Sultra Daily media, the reason for the existence of media business function elements in a rubric determination is a factor causing the minimal number of Rakyat Sultra daily news in highlighting the Kendari city government's policy issues regarding flooding problems and their handling.

Copyright © 2024 Umar Marhum, Rahmanuddin Tomalili, Hasjad, Agus Ariadi
This work is licensed under a **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Hujan berkepanjangan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir yang melanda hampir semua wilayah di Indonesia, dan tidak sedikit merusak fasilitas milik warga, termasuk fasilitas umum milik pemerintah, seperti terputusnya jembatan penghubung antara desa yang satu dan desa lainnya atau kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Akibat banjir tidak sedikit warga masyarakat tani yang kehilangan mata pencaharian akibat padi pada lahan persawahan rusak terendam banjir, dan tidak sedikit pula diantara mereka kehilangan rumah tempat tinggal karena hanyut diterjang banjir.

Bencana banjir tidak saja hanya melanda wilayah yang ada di pedesaan tetapi juga melanda hampir semua wilayah kota di Indonesia, termasuk Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak pernah luput dari bencana banjir pada setiap kali musim hujan dengan intensitas tinggi. Luapan dua sungai besar yakni, Sungai Wanggu dan Sungai Sampara yang hilirnya berada di Kota Kendari, menjadikan Kota Kendari tak pernah luput dari ancaman musibah banjir.

Ditambah lagi dengan perilaku warga masyarakat yang tidak ramah lingkungan, melakukan penebangan pohon dikawasan hutan lindung, aktivitas pertambangan tidak terkendali dan pola hidup masyarakat yang melakukan pembuangan sampah pada sembarang tempat, hingga menyubut saluran air, juga mejadi salah satu penyumbang penyebab terbesar terjadinya banjir yang melanda pemukiman warga masyarakat Kota Kendari pada setiap kali musim hujan dengan intensitas tinggi.

Untuk menjawab permasalahan banjir di Kota Kendari sangat dibutuhkan adanya keberpihakan kebijakan pemerintah kota Kendari dibidang penataan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Pemerintah Kota Kendari seharusnya lebih fokus pada penanganan permasalahan warganya, utamanya terkait penanganan banjir yang kerap melanda pemukiman warga, ketimbang pembangunan mega proyek kantor walikota baru dengan konstruksi bangunan 9 lantai, menghabiskan anggaran Rp. 270 miliar, sebab fasilitas kantor lama masih sangat layak untuk dipakai memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu upaya kebijakan pemerintah Kota Kendari membangun kolam retensi yang terletak di Jl. Boulevard Kota Kendari untuk mengurai debit air sungai Wanggu pada saat musim hujan, belum dapat menjawab permasalahan warga kota Kendari terhadap banjir. Warga Kota Kendari masih terus terhantui dengan bencana pada setiap kali musim hujan.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Atas hal itu setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana dan memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Dengan fungsi informasi dan fungsi kontrol yang dimilikinya itu, Pers sesungguhnya telah memiliki kapasitas yang cukup untuk menyuarakan apa yang menjadi derita rakyat, dan menyampaikannya kepada pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah kota Kendari melalui karya pers, (berita yang ditulisnya) agar pemerintah Kota Kendari bisa mengambil langkah kebijakan pembangunan terhadap penanganan masalah banjir yang terus menjadi masalah bagi warga kota Kendari pada setiap kali musim hujan.

Media harian Rakyat Sultra sebagai salah satu media pers cetak lokal terbesar di Kota Kendari, dengan slogan yang diusungnya, paling mengerti Sulawesi Tenggara, diharapkan mampu menjabarkan slogan itu dengan menjadi corong masyarakat bagi pemerintah, agar pemerintah dapat menerapkan kebijakan pembangunan yang betul-betul berpihak pada kepentingan masyarakat yang menjadi skala prioritas utama, bukan malah sebaliknya mendukung kebijakan pemerintah mengejar keuntungan fie proyek lalu mengabaikan penderitaan rakyat.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang bepedoman pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder: 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagai pendukung dari penelitian ini; 2) Data Sekunder adalah yang tidak langsung diperoleh peneliti dari sumbernya langsung, tetapi dari sumber informasi yang lain seperti dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur terhadap banyak buku dan jurnal dan dilakukan pencatatan yang berhubungan dengan penelitian. Mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menjadi payung hukum dari para pekerja pers: 1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu meliputi permasalahan

yang berkaitan dengan judul skripsi; 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa pendapat peneliti sebelumnya dalam berbagai literatur, dokumen, dan sumber internet.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data. Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara: a) Studi Pustaka (*Library Research*). Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literature peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan; b) Wawancara. Dilakukan dengan pihak-pihak yang memahami permasalahan yang sedang diteliti, hal ini dilakukan sebagai data pendukung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

Pengolahan Data, Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara: a) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan; b) Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara tertaur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan; c) Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab dan Dampak Bencana Banjir yang Melanda Kota Kendari

Kota Kendari merupakan salah satu kota di Indonesia yang terus menjadi langganan banjir ketika terjadi hujan berkepanjangan dengan intensitas tinggi. Akibat bencana banjir tidak sedikit fasilitas milik warga menjadi rusak akibat terendam banjir. Banjir juga menghambat aktivitas transportasi angkutan darat masyarakat karena sejumlah ruas jalan yang ada di kota Kendari tergenang, akibat dari sungai Wanggu dan Sungai Sampara yang merupakan induk sungai terbesar yang hilirnya di Kota Kendari meluap dan sejumlah anak sungai lainnya mengalami banjir.

Akibat banjir juga menyebabkan aktivitas layanan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat juga menjadi terganggu, hingga melahirkan kerugian yang besar baik secara moral maupun materi. Luapan dua sungai besar yakni, Sungai Wanggu dan Sungai Sampara yang hilirnya berada di Kota Kendari, menjadikan Kota Kendari tak pernah luput dari ancaman musibah banjir.

Ditambah lagi dengan perilaku warga masyarakat yang tidak ramah lingkungan dengan membuang sampah disembarang tempat membuat sejumlah drainase yang ada disekitar wilayah di kota Kendari tersumbat dan menjadikan salah satu penyebab terjadinya banjir yang melanda pemukiman warga masyarakat Kota Kendari pada setiap kali musim hujan dengan intensitas tinggi. Untuk menjawab permasalahan banjir di Kota Kendari sangat dibutuhkan adanya keberpihakan kebijakan pemerintah kota Kendari, dalam hal penataan kota dan pengelolaan lingkungan yang baik.

Pemerintah Kota Kendari seharusnya lebih fokus pada penanganan permasalahan warganya, menjadikan penanganan banjir sebagai skala prioritas, dimana banjir kerap melanda pemukiman warga pada setiap kali musim hujan dengan intensitas tinggi, ketimbang pembangunan mega proyek lainnya. Seperti proyek pembangunan kantor walikota baru dengan konstruksi bangunan 9 lantai yang menghabiskan anggaran Rp. 270 miliar. Sebab fasilitas kantor lama masih sangat layak untuk dipakai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Kota Kendari Terhadap Penanganan Banjir

Upaya penanganan banjir oleh pemerintah kota Kendari terhadap bencana banjir yang terus melanda wilayah pemukiman warga kota Kendari terus diupayakan, walaupun belum bisa menjawab permasalahan banjir secara keseluruhan. Salah satu upaya kebijakan pemerintah Kota Kendari yang nyata terhadap penanganan banjir di kota Kendari adalah membangun kolam retensi yang terletak di Jl. Boulevard Kota

Kendari untuk mengurai debit air sungai Wanggu pada saat musim hujan. Namun keberadaan kolam retensi tersebut belum mampu menjawab permasalahan warga kota Kendari terhadap masalah banjir. Warga Kota Kendari masih terus terancam dengan bencana banjir pada setiap kali musim hujan.

Belum memadainya drainase di wilayah pemukiman warga padat penduduk juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir yang sering melanda wilayah kota Kendari pada setiap kali musim hujan berkepanjangan dengan intensitas tinggi.

Hasil pantauan peneliti pada setiap kali musim hujan berintensitas tinggi wilayah yang paling menjadi langganan banjir di Kota Kendari diantaranya adalah: a) Perempatan Lampu Merah MTQ Jln Saranani Kelurahan Bonggoeya; b) Jln MT Haryono Depan Matahari Plaza Depstore Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia; c) Jl Syeh Yusuf Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga; d) Ruas Jln Utama di Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat; e) Jl Utama depan Stadion Lakidende, Kelurahan Bende Kecamatan Kadia; f) Perumahan Dosen Kampus Baru UHO Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu; g) Jln Garuda Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu; h) Perempatan Bundaran Tank, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu; i) Kendari Beach Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat; j) Kawasan Kota Lama Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari; k) Jln By Pass Mulai dari Bundaran Stynles hingga lampu merah pasar baru depan Lippo Plaza. Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia.

Perda Kota Kendari No. 1 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030

Dalam upaya penataan kota Kendari sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, menjadikan kota Kendari sebagai pusat kota jasa dan bisnis, hubungannya dengan menciptakan keamanan dan kenyamanan para pelaku bisnis dalam berinvestasi, bencana banjir merupakan salah satu ancaman terbesarnya. Pemerintah Kota Kendari sesungguhnya telah menuangkan penanganan banjir di kota Kendari dalam salah satu Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari. Pada Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang, rencana tata ruang wilayah kota Kendari tahun 2010-2030.

Untuk penataan ruang wilayah kota hubungannya dengan pengendalian kawasan dan penataan pada kawasan-kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi, yang didalamnya telah memuat poin, untuk mengendalikan terjadinya banjir dikawasan pemukiman, dengan salah satu solusinya adalah mengembangkan dan melakukan penataan sistem drainase yang baik dalam kota. Secara spesifik pada Perda tersebut dimuat pada Bab II, pasal 4 bagian ketiga tentang strategi penataan ruang wilayah kota. Pada poin (d) pada Perda tersebut menyebutkan mengendalikan dan melakukan penataan pada kawasan-kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi. Pada poin (e) disebutkan mengembangkan dan melakukan penataan sistem drainase dalam kota sebagai salah satu upaya mengatasi terjadinya banjir dalam kota pada wilayah kawasan pemukiman warga yang padat penduduk.

Perda ini seharusnya telah menjadi salah satu rujukan upaya kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah kota Kendari menjawab permasalahan warga kota Kendari terkait banjir, namun faktanya pemerintah Kota Kendari belum menjadikan hal itu sebagai pembangunan yang menjadi skala prioritas, dan memilih membangun kantor wali kota baru yang megah dengan konstruksi bangunan 9 lantai, menghabiskan anggaran Rp. 270 miliar, dengan alasan untuk lebih memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Pers Harian Rakyat Sultra dalam Menjalankan Fungsi Kontrolnya Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Kendari Dibidang Penanganan Bencana Banjir di Kota Kendari

Pers sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 40 Tahun 1999, mempunyai lima fungsi yang dimilikinya, Yaitu: 1) Pers sebagai media informasi. Pers sebagai media massa memiliki tugas utama, yaitu menginformasikan berbagai informasi kepada masyarakat. Berbagai informasi ini dapat berupa lisan, tulisan, atau siaran langsung terkait pemberitaan politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, serta budaya; 2) Pers sebagai Pendidikan. Pers juga dapat mengedukasi dan memberikan wawasan luas kepada para pemirsanya. Pendidikan ini bisa berupa tayangan dokumenter, wawancara, cerita, artikel, dan berbagai bentuk lainnya; 3) Pers sebagai media hiburan. Selain untuk mengedukasi masyarakat, pers juga memiliki fungsi untuk menyajikan hiburan pada para pemirsanya dengan menayangkan cerpen, puisi, komik, olah raga, drama, film, musik, podcast, dan berbagai macam lainnya. Tentu hiburan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tak melanggar hukum, HAM, serta nilai-nilai Pancasila; 4) Pers sebagai media kontrol sosial. Pers dapat berperan sebagai kontrol sosial, hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 6 butir d yang berbunyi “Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”. Kontrol sosial ini juga berguna untuk menghubungkan pemerintah dengan masyarakatnya. Contohnya, pers dapat mengawasi jika terjadinya pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalitas, hingga ancaman ekonomi, baik yang pemerintah ataupun

masyarakat lakukan; 5) Pers sebagai lembaga ekonomi. Pers juga boleh mengambil keuntungan ekonomi dalam bisnis, seperti menyiarkan iklan yang berbayar dalam berbagai macam jenis dan bentuk. Maka atas dasar itu media melalui fungsi informasi dan control sosialnya seharusnya mampu menjadi corong atau alat penghubung bagi masyarakat kepada pemerintah.

Dengan fungsi informasi dan fungsi kontrol yang dimilikinya, Pers sesungguhnya telah memiliki kapasitas yang cukup untuk menyuarakan apa yang menjadi derita rakyat, dan menyampaikannya kepada pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah kota Kendari melalui karya pers (berita yang ditulisnya), agar pemerintah kota Kendari bisa mengambil langkah kebijakan pembangunan terhadap penanganan masalah banjir yang terus menjadi masalah bagi warga kota Kendari pada setiap kali musim hujan.

Media Harian Rakyat Sultra sebagai salah satu media pers cetak lokal terbesar di Kota Kendari, dengan slogan atau misi yang diusungnya, paling mengerti Sulawesi Tenggara, sesungguhnya harus mampu menjabarkan slogan itu dengan menjadi corong masyarakat bagi pemerintah, agar pemerintah dapat menerapkan kebijakan pembangunan yang betul-betul berpihak pada kepentingan masyarakat yang menjadi skala prioritas utama, bukan malah sebaliknya mendukung kebijakan pemerintah mengejar keuntungan melalui proyek lalu mengabaikan penderitaan rakyat.

Terkait dengan fungsi kontrol sosial media harian rakyat Sultra yang merupakan salah satu media cetak terbesar di Kota Kendari, ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, terkait dengan isu lingkungan, khususnya kebijakan pemerintah kota Kendari terhadap penanganan bencana banjir di wilayah pemukiman padat penduduk masih belum maksimal. Walaupun pada bidang lain seperti isu politik, pendidikan dan ekonomi telah berjalan dengan baik.

Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak adanya rubrik khusus tentang lingkungan pada halaman media harian rakyat Sultra, serta kurangnya pemberitaan yang disajikan Harian Rakyat Sultra, yang isinya mewakili suara masyarakat Kota Kendari, meminta pemerintah Kota Kendari agar isu lingkungan khususnya penanganan masalah banjir dijadikan skala prioritas dalam pembangunan. Hasil wawancara dengan Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Sultra Drs. Idul Amir yang merupakan penanggungjawab umum pemberitaan, terkait dengan penentuan rubrikasi halaman. Diputuskan pada rapat umum keredaksian, dengan melihat tingkat kebutuhan pembaca, selanjutnya keputusan rapat menjadi sebuah kebijakan para redaktur penanggungjawab halaman dalam bekerja. Karena media selain melayani kebutuhan publik terkait informasi yang update, aktual dan faktual juga di dalamnya terbungkus oleh kepentingan bisnis, sehingga arah pemberitaan juga dapat dipengaruhi oleh unsur bisnis. Sesuai dengan pernyataan Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Sultra, isu lingkungan terpantau dari kebijakan Redaksi Harian Rakyat Sultra pembacanya sangat kurang sehingga tidak dimasukkan sebagai salah satu rubrikasi khusus, pada halaman koran Harian Rakyat Sultra.

Mengacu pada ketentuan Pers sebagai media kontrol sosial dimana Pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 6 butir d, yang berbunyi “Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”, Pers Harian Rakyat Sultra, khusus untuk kritik kebijakan pemerintah kota Kendari terhadap penanganan bencana banjir di Kota Kendari, belum dilaksanakan secara optimal, yang dapat dilihat pada judul dan isi pemberitaan tentang banjir yang hanya datar-datar saja atau disebut dengan karya jurnalis yang hanya mengemban fungsi informasi, tidak ada penekanan keras yang berisi kritik tentang adanya kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan skala prioritas warga masyarakat Kota Kendari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Media Harian Rakyat Sultra dalam mengemban fungsi kontrol pers, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pers No: 40 Tahun 1999 tentang Pers dibidang lingkungan, khususnya dalam hal menyuarakan masalah penanganan banjir yang terus melanda masyarakat Kota Kendari, pada setiap musim hujan dengan intensitas tinggi, belum maksimal. Walaupun pada dibidang lain seperti Pendidikan, Bisnis dan Politik telah dilakukannya secara maksimal, karena adanya rubrikasi khusus yang disiapkan. Sementara rubrik lingkungan khususnya penanganan masalah banjir di Kota Kendari hanya ditempatkan pada rubrik halaman Metro, yang merupakan gabungan dari semua berita peristiwa di Kota Kendari. Sehingga menjadi faktor penyebab minimnya jumlah berita harian Rakyat Sultra dalam menyorot isu kebijakan pemerintah Kota Kendari terhadap masalah banjir dan penanganannya; 2) Melalui Fungsi kontrol media terhadap isu lingkungan khususnya dalam hal penanganan masalah banjir di Kota Kendari yang secara berkesinambungan yang didalamnya terdapat nilai informasi dan edukasi diharapkan bisa merubah kebijakan pemerintah Kota Kendari, untuk menjadikan pembangunan *drainase* (saluran air)

yang memadai sebagai skala prioritas untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Kendari, yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan utama dan lingkungan pemukiman warga tergenang air, pada setiap musim hujan dengan intensitas yang tinggi.

DAFTAR REFERENSI

- Assegaff, Dja'far H. 1985. *Jurnalistik Masa Kini Pengantar ke Praktek Kewartawanan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Bill Jenkins. 1998. *Public Analys. Oxford. Martin Robertson*
- Considine, Mark. 2004. *Public Policy: A Critical Approach. Melbourne McMillan*.
- Djuroto, Totok. 2002. *Manajemen Penerbitan Pers*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Hunter.1998. *Illustrated Genera of Imperfect Fungi*, 4th Edition. Macmillian Publishing Company, New York, NY.218 pp. bibr07
- Husein, Ali Sofyan. 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Imo'atus Syaripah, *Menggagas Jurnalisme Profetik dalam Infotainment (Studi pada Program Entertainment News Net)*, Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019, hlm. 20-21)
- Jamhur Poti, *Demokratisasi Media Massa dalam Prinsip Kebebasan*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011.
- M. Syahnan Harahap, *Tinjauan Hukum Peran Pers Guna Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 4 No. 1, September 2013.
- Nugroho, R. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implemetasi dan Evaluasi*. Jakarta. Media Elex Komputindo
- Perda Kota Kendari No 1 Tahun 2012, *Tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 *tentang Izin Lingkungan Hidup*.
- Peraturan Menteri PU NO. 63/PRT/1993, *Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai*.
- Riplay, B Riplay. 2005. *Policy Analysis In Political Science. Chicago Nelson Hall Publisher*.
- Rahayu(ed). 2006. *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, Dewan Pers dan Departemen Komunikasi dan Informasi: Jogjakarta.
- Rietbergen-Mc Cracken, Jennifer & Narayan, Deepa,” *Participation and Social Assessment: Toolsand Techniques*”, *The International Bankfor Deconstructionand Development/ The World Bank, USA,1998*. (www.worldbank.org)
- Sobur, Alex. 2002. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 1-2).
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun (2007) *Tentang Penanggulangan Bencana*. (Jurnal Abdidas Vol 3 No 3 Tahun 2022 p-ISSN 2721-9224 e-ISSN 2721-9216).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 *tentang Pers*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2000, *Tentang PROPENAS 2000-2004*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 *Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Kemakmuran Rakyat*.
- Undang No. 26 Tahun 2007 *tentang Penataan Ruang Wilayah*
- Zaid, Zainal Abidin. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Penerbit Pancur Siwah.